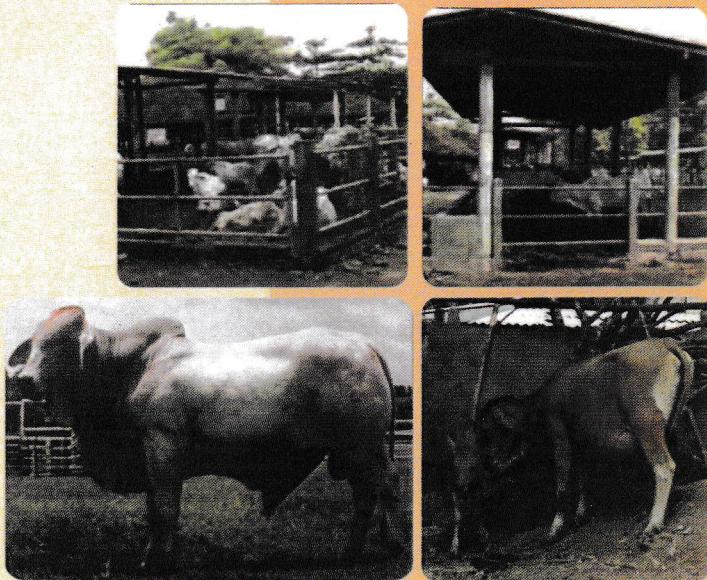


PETUNJUK PELAKSANAAN

LABORATORIUM LAPANG DAN SEKOLAH LAPANG DALAM PEMBIBITAN DAN PENGEMUKAN SAPI POTONG (LL DAN SL-PPSP)



PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2011



PETUNJUK PELAKSANAAN

LABORATORIUM LAPANG DAN SEKOLAH LAPANG DALAM PEMBIBITAN DAN PENGGEMUKAN SAPI POTONG (LL DAN SL-PPSP)

Penyusun:

Syamsul Bahri
Bess Tiesnamurti
Rasali Hakim Matondang
Hasanatun Hasinah
Bambang Setiadi
Atien Priyanti
Chalid Talib
Rachmat Hendayana
Syahrul Bustaman
Yulvian Sani



PUSAT PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
2011

PETUNJUK PELAKSANAAN

LABORATORIUM LAPANG DAN SEKOLAH LAPANG DALAM PEMBIBITAN DAN PENGGEMUKAN SAPI POTONG (LL DAN SL-PPSP)

Hak Cipta @2011. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
Jl. Raya Pajajaran Kav.E-59
Bogor, 16151
Telp. : (0251) 8322185
Fax : (0251) 8328382 ; 8380588
Email : criansci@indo.net.id

Isi buku dapat disitasi dengan menyebutkan sumbernya.

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Bahri, S. 2011. Petunjuk Pelaksanaan Laboratorium Lapang dan Sekolah Lapang Dalam Pembibitan dan Penggemukan Sapi Potong (LL dan SL-PPSP)/Syamsul Bahri, dkk. – Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan, 2011: vii + 33 hlm; ilus.;16 x 21 cm.

ISBN 978-602-8475-34-1

1. Sapi Potong
3. LL dan SL-PPSP

2. Petunjuk Pelaksanaan

I. Judul; II. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan;
III. Bahri, S

636.22(042.5)

KATA PENGANTAR

Program Swasembada Daging Sapi Kerbau (PSDSK) 2014 merupakan salah satu program Nasional Kementerian Pertanian. Program ini merupakan kelanjutan dari 2 (dua) periode sebelumnya, oleh karena itu diperlukan berbagai strategi dan koordinasi lintas sektor maupun subsektor dan antar kementerian serta melibatkan berbagai pihak pelaku usaha sapi potong. Diharapkan masing-masing pihak terkait dapat berperan secara aktif dalam menjalankan program dan kegiatannya mendukung PSDSK 2014.

Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Pertanian bekerjasama dengan Ditjen Tanaman Pangan telah berhasil mengelola program Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT). Dalam program ini, para peneliti, penyuluh dan aparat pertanian di lapang bersama-sama dengan para petani menerapkan kegiatan pengelolaan tanaman terpadu (terutama untuk tanaman padi) guna mendukung Program Nasional Swasembada Beras. Program ini dianggap cukup berhasil, oleh karena itu dengan pola serupa konsep ini akan diterapkan pada peternakan sapi potong guna mendukung PSDSK 2014.

Untuk mewujudkan konsep tersebut, maka Badan Litbang Pertanian telah menugaskan Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan (Puslitbangnak) beserta unit kerja terkait lainnya di lingkup Badan Litbang Pertanian untuk melaksanakan tugas tersebut. Dari berbagai pertemuan dan diskusi yang diinisiasi oleh Puslitbangnak, maka telah tersusun Buku Petunjuk Pelaksanaan Laboratorium Lapang dan Sekolah Lapang Dalam Pembibitan dan Penggemukan Sapi Potong (LL dan SL-PPSP). Buku ini memuat mekanisme transfer dan penerapan teknologi maupun prinsip proses belajar-mengajar menyerupai pada konsep SL-PTT. Aspek teknis difokuskan kepada kegiatan pembibitan dan penggemukan sapi potong, karena kedua aspek ini saling terkait dan merupakan inti dari budidaya sapi potong untuk menghasilkan daging sapi secara berkelanjutan.

Buku Petunjuk Pelaksanaan LL dan SL-PPSP ini juga akan dilengkapi dengan Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis yang terkait dengan implementasi teknologi yang akan diterapkan. Apabila diperlukan, BPTP dalam pelaksanaanya dapat membuat panduan teknis praktis untuk memudahkan para peternak mengadopsi teknologi tersebut. Buku ini diharapkan akan memudahkan berbagai pihak untuk mengikuti kegiatan LL dan SL-PPSP.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terimakasih kepada para nara sumber dan semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan buku Petunjuk Pelaksanaan LL dan SL-PPSP. Berbagai saran untuk penyempurnaan buku ini sangat kami hargai, dan semoga bermanfaat bagi para pelaku usaha sapi potong di Indonesia.

Bogor, 18 April 2011

Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan

Dr. Bess Tiesnamurti

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Gambar	vii
I. Pendahuluan.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tujuan dan Sasaran	3
1.3. Ruang Lingkup	3
1.4 Pengertian dan Prinsip dalam LL dan SL-PPSP.	5
II. Laboratorium Lapang Pembibitan dan Penggemukan Sapi Potong	8
2.1. Usaha Pembibitan Sapi Potong.....	8
2.1.1. Sarana dan prasarana	8
2.1.2. Proses produksi	11
2.2. Usaha Penggemukan Sapi Potong	13
2.2.1. Seleksi sapi bakalan	13
2.2.2. Perkandungan	14
2.2.3. Manajemen pakan	14
2.2.4. Manajemen kesehatan hewan	14
2.2.5. Manajemen produksi	15
2.2.6. Pascapanen dan pemasaran	15

III.	Sekolah Lapang Pembibitan dan Penggemukan Sapi Potong	16
3.1.	Pendekatan	16
3.2.	Pemandu dan Peserta	16
3.3.	Waktu	17
IV.	Implementasi Pendampingan dan Dukungan UK/UPT Lingkup Badan Litbang Pertanian	18
4.1	Model Pendampingan Melalui LL dan SL-PPSP	18
4.2.	Tahapan Pendampingan Melalui LL dan SL-PPSP	20
4.3.	Pendampingan oleh BPTP	22
4.4.	Pendampingan oleh Balai Besar/Puslitbang/ Balit/Lolit	23
4.5.	Pengorganisasian	26
V.	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	31
5.1.	Monitoring dan Evaluasi	31
5.2.	Pelaporan	32
VI.	Penutup	33

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Konsep SL-PPSP	20
Gambar 2. Organisasi Pelaksana LL dan SL-PPSP.....	27

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada tahun 2010 permintaan daging sapi nasional mencapai 402,9 ribu ton, dimana pemerintah baru dapat menyediakan dari produksi lokal sebesar 282,9 ribu ton. Guna memenuhi permintaan daging nasional, pemerintah melakukan impor sebesar 35% yang terdiri dari sapi bakalan sebesar 46,3 ribu ton dan daging sebesar 73,7 ribu ton. Seiring dengan pertambahan penduduk dan meningkatnya pendapatan, maka kebutuhan daging sapi pada tahun 2014 diprediksi akan meningkat menjadi 467 ribu ton (meningkat 10% dari tahun 2010). Untuk memenuhi kebutuhan tersebut sekitar 420,3 ribu ton diperoleh dari produksi lokal dan sisanya 46,7 ribu ton (10%) dipenuhi dari impor (Ditjennak, 2010).

Dalam rangka memenuhi target produksi daging sapi lokal sebesar 420,3 ribu ton, Kementerian Pertanian mencanangkan Program Swasembada Daging Sapi (PSDS) Tahun 2014, yang terdiri dari 5 Program Pokok yaitu: (1) Penyediaan bakalan/daging sapi lokal; (2) Peningkatan produktivitas dan reproduktivitas ternak sapi lokal, (3) Pencegahan pemotongan sapi betina produktif, (4) Penyediaan bibit sapi, dan (5) Pengaturan *stock* daging sapi dalam negeri. Program Pokok tersebut dijabarkan ke dalam 13 kegiatan operasional, yaitu: (1) Pengembangan usaha pengembangbiakan dan penggemukan sapi; (2) Pengembangan pupuk organik dan biogas; (3) Pengembangan integrasi ternak-tanaman; (4) Pemberdayaan dan peningkatan kualitas rumah potong hewan; (5) Revitalisasi kegiatan IB dan INKA beserta sarana pendukungnya; (6) Penyediaan dan pengembangan pakan dan air; (7) Penanggulangan gangguan reproduksi dan peningkatan pelayanan kesehatan hewan; (8) Penyelamatan sapi betina produktif; (9) Penguatan wilayah sumber bibit dan kelembagaan usaha pembibitan; (10) Pengembangan usaha pembibitan sapi potong melalui *village breeding centre* (VBC); (11)

Penyediaan bibit melalui subsidi bunga (program KUPS); (12) Pengaturan impor sapi bakalan dan daging; serta (13) Pengaturan distribusi dan pemasaran sapi bakalan dan daging sapi di dalam negeri.

Pada bulan November 2010 dalam rangka *launching* Gerakan Aksi Membangun Pertanian Rakyat Terpadu Provinsi Banten, Menteri Pertanian menyatakan bahwa PSDS juga berasal dari daging kerbau, sehingga Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan telah melakukan revisi *Blue Print* Program Swasembada Daging Sapi menjadi Program Swasembada Daging Sapi dan Kerbau (PSDSK) 2014. Permasalahan yang dihadapi dalam mendukung PSDSK antara lain: (a) panjangnya selang beranak yang masih di atas 15 bulan, (b) tingginya angka kematian anak hingga mencapai lebih dari 20% dan angka kematian induk lebih dari 10%, (c) tingginya angka pemotongan sapi betina produktif, (d) kurangnya pejantan berkualitas di beberapa wilayah sumber bibit pada pola pemeliharaan ekstensif, (e) masih sangat beragamnya produktivitas sapi, dan (f) banyaknya pemotongan sapi muda sebelum mencapai bobot optimal.

Berkaitan dengan hal tersebut, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian menyelenggarakan unit percontohan melalui Laboratorium Lapang (LL) Pembibitan dan Penggemukan Sapi Potong dan pengembangannya melalui Sekolah Lapang (SL). Untuk menyamakan persepsi tentang LL dan SL tersebut, maka disusun Petunjuk Pelaksanaan penyelenggaraan LL dan SL Pembibitan dan Penggemukan Sapi Potong (SL-PPSP) yang ditujukan bagi para pemandu lapang.

1.2. Tujuan dan Sasaran

Buku ini bertujuan sebagai acuan untuk mempercepat penerapan komponen teknologi dalam mendukung usaha pembibitan dan penggemukan sapi potong yang dapat meningkatkan produktivitas ternak dan pendapatan peternak.

Sasaran yang diharapkan adalah tercapainya target peningkatan produktivitas ternak sebesar 15% bagi peternak kooperator.

1.3. Ruang Lingkup

Usahaternak sapi dan kerbau menurut pola usahanya dapat dikelompokkan menjadi usaha pembibitan dan usaha penggemukan. Pada usaha pembibitan, efisiensi usaha dipengaruhi oleh: (a) selang beranak, (b) bobot lahir anak, (c) laju pertumbuhan pedet (prasapih dan pascasapih), (d) bobot sapih, dan (e) laju tingkat kematian. Pada usaha penggemukan, efisiensi produksi ini dipengaruhi oleh: (a) efisiensi penggunaan pakan, dan (b) efisiensi ekonomi untuk menghasilkan per kg bobot hidup.

Usaha peternakan sapi dan kerbau di Indonesia, sebagian besar dilakukan oleh peternakan rakyat dengan skala usaha yang relatif rendah (1-5 ekor) dan produktivitas yang masih sangat beragam, dan umumnya relatif masih rendah. Peningkatan produktivitas usahaternak berpeluang untuk ditingkatkan melalui transfer ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) tepat guna dengan mempertimbangkan segi-segi efisiensi usaha melalui pemberdayaan kelembagaan dan dukungan kebijakan.

Proses difusi inovasi IPTEK (utamanya dihasilkan oleh inovasi Badan Litbang Pertanian), pemberdayaan kelembagaan dan dukungan kebijakan relatif cepat diadopsi oleh peternak (kelompok peternak) dengan pendekatan proses belajar mengajar melalui LL

dan praktik di SL. Jenis IPTEK peternakan yang diintroduksikan, tingkat pemberdayaan kelembagaan, dan dukungan kebijakan, bersifat spesifik lokasi untuk mengatasi permasalahan utama dalam hal rendahnya efisiensi produksi usaha ternak sapi potong dan kerbau.

Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/ kota sesuai dengan kewenangannya bersama dengan lembaga penelitian dan pengembangan pertanian (lingkup Kementerian Pertanian dan/atau perguruan tinggi), dan pemangku kepentingan terkait, secara koordinatif melakukan pengawalan LL dan SL. Program pengawalan dilaksanakan melalui organisasi pelaksana PSDSK (Unit Manajemen PSDSK) dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga di tingkat kecamatan (Satuan Tugas PSDSK). Hal ini untuk kegiatan LL dan SL disebut sebagai "Pemandu Lapang".

Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan LL dan SL-PPSP meliputi :

1. Mekanisme transfer IPTEK peternakan menurut pola usaha (usaha pembibitan dan usaha penggemukan) sapi potong dan kerbau dengan pendekatan LL dan SL;
2. Organisasi pelaksana Pemandu Lapang LL dan SL;
3. Proses pendampingan dan pengawalan; serta
4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Yang dimaksud dengan sapi potong dalam petunjuk pelaksanaan ini adalah sapi potong dan kerbau.

LL dan SL-PPSP dilaksanakan berdasarkan 5 (lima) prinsip utama, yaitu:

- a). **Partisipatif.** Peternak berperan aktif dalam penentuan teknologi sesuai kondisi setempat serta meningkatkan kemampuan melalui pembelajaran di LL.

- b). **Spesifik lokasi.** Memperhatikan kesesuaian teknologi dengan lingkungan sosial budaya, dan ekonomi peternak setempat.
- c). **Terpadu.** Sumberdaya ternak, tanaman pakan ternak, tanah, dan air dikelola dengan baik secara terpadu.
- d). **Sinergis atau serasi.** Pemanfaatan teknologi terbaik memperhatikan keterkaitan antar komponen teknologi yang saling mendukung.
- e). **Dinamis.** Penerapan teknologi selalu disesuaikan dengan perkembangan dan kemajuan Iptek serta kondisi sosial ekonomi setempat.

1.4. Pengertian dan Prinsip dalam LL dan SL-PPSP

- a). **Laboratorium Lapang Pembibitan dan Penggemukan Sapi Potong (LL-PPSP)** adalah unit percontohan yang dikelola oleh kelompok peternak sebagai usaha pembibitan dan penggemukan sapi potong serta berfungsi sebagai tempat temu lapang, tempat belajar dan praktek penerapan teknologi.
- b). **Sekolah Lapang Pembibitan dan Penggemukan Sapi Potong (SL-PPSP)** adalah proses pendidikan non formal bagi peternak yang belajar dari LL dan bertujuan untuk mengembangkan atau memperluas kelompok-kelompok anggota VBC maupun kelompok peternak sapi lainnya.
- c). **Kelompok peternak** adalah kelompok peternak yang sudah terbentuk, aktif dan memiliki struktur organisasi yang jelas. Kelompok direkomendasi oleh dinas peternakan atau dinas yang membidangi fungsi peternakan di tingkat kabupaten/kota. Jumlah anggota minimal 20 orang yang memiliki populasi sapi induk minimal 50 ekor. Berpotensi dan sepakat menjadi penggerak dalam mendorong pengembangan usaha pembibitan sapi. Aktivitas kelompok mengarah pada usaha pembibitan sapi

potong yang dapat dikembangkan menjadi VBC atau memperkuat VBC yang sudah ada.

- d). **Pemandu Lapang (PL)** adalah petugas bidang peternakan di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, yang berfungsi sebagai Satgas PSDSK kecamatan, petugas kesehatan hewan, inseminator yang telah mengikuti pelatihan pemandu lapang.
- e). **Pengawalan teknologi oleh Peneliti** adalah kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dan narasumber kompeten lainnya guna meningkatkan pemahaman dan adopsi teknologi pembibitan dan penggemukan sapi potong, dengan melakukan uji adaptasi, demo-plot dan supervisi penerapan teknologi pada lokasi LL.
- f). **Pendampingan oleh Penyuluhan** adalah kegiatan yang dilakukan oleh penyuluhan guna menerapkan teknologi spesifik lokasi berbasis IPTEK yang utamanya dihasilkan oleh inovasi Badan Litbang Pertanian. Hal ini dilakukan secara berkala khususnya lokasi SL dalam rangka pemberdayaan kelompok peternakan sekaligus memberikan bimbingan kepada kelompok dalam penerapan teknologi.
- g). **Pengawalan dan pendampingan oleh Petugas Kesehatan Hewan** adalah kegiatan pendampingan oleh tenaga kesehatan hewan dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit hewan.
- h). **Usaha pembibitan sapi potong** yang selanjutnya disebut sebagai usaha pembibitan adalah serangkaian kegiatan budidaya dengan tujuan utama menghasilkan anak sapi (pedet) dan dibesarkan sampai umur sapih (umur ≥ 6 bulan).
- i). **Usaha penggemukan sapi potong** yang selanjutnya disebut usaha penggemukan adalah serangkaian kegiatan budidaya sapi potong bakalan jantan dengan tujuan utama sebagai penghasil daging (ternak potong).

- j). **Rumpun ternak** adalah segolongan ternak dari suatu jenis (spesies) yang mempunyai ciri fenotipe yang khas dan ciri tersebut dapat diwariskan pada keturunannya.
- k). **Galur ternak** adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakan.
- l). **Seleksi** adalah kegiatan memilih tetua untuk menghasilkan keturunan melalui pemeriksaan dan/atau pengujian berdasarkan kriteria dan tujuan tertentu dengan menggunakan metodologi tertentu.
- m). **Village Breeding Center (VBC)** adalah kawasan pengembangan peternakan yang berbasis pada usaha pembibitan ternak rakyat yang tergabung dalam kelompok peternak pembibit.

II. LABORATORIUM LAPANG PEMBIBITAN DAN PENGEMUKAN SAPI POTONG

Laboratorium Lapang Pembibitan dan Penggemukan Sapi Potong (LL-PPSP) merupakan suatu kegiatan utama introduksi teknologi berbasis spesifik lokasi yang dihasilkan oleh Badan Litbang Pertanian.

2.1. Usaha Pembibitan Sapi Potong

Efisiensi produksi usaha pembibitan antara lain dipengaruhi oleh jangka waktu bibit betina menghasilkan anak, bobot lahir dan pertumbuhan pedet yang dilahirkan, serta laju tingkat kematian. Untuk mencapai harapan yang diinginkan, faktor-faktor ang perlu diperhatikan yaitu: (1) kelengkapan sarana dan prasarana; serta (2) proses produksi.

2.1.1. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana yang dimaksud dalam usaha pembibitan meliputi: (a) lokasi, (b) lahan, (c) sumber air, (d) bangunan kandang dan perlengkapannya, (e) bibit betina dan/atau bibit jantan, (f) pakan, (g) obat hewan, dan (h) tenaga kerja.

a. **Lokasi.** Lokasi implementasi LL seyogyanya: (i) tidak bertentangan dengan rencana umum tata ruang dan rencana detail tata ruang daerah, (ii) mempunyai potensi sebagai wilayah sentra produksi yang mengarah terhadap penguatan sebagai wilayah VBC, (iii) terkonsentrasi dalam suatu kawasan dan relatif mudah dijangkau untuk pelaksanaan pengawalan teknologi, (iv) kondisi agroekosistem sesuai untuk pengembangan usaha pembibitan sapi potong (tersedia sumber pakan lokal, air, dan bukan daerah endemis penyakit hewan menular dan penyakit

strategis), dan (v) tersedia sarana dan prasarana serta kelembagaan yang terkait dengan usaha pembibitan sapi potong.

- b. **Lahan.** Lahan seyogyanya berdasarkan rekomendasi dari Dinas Peternakan atau dinas yang membidangi fungsi peternakan dinyatakan bebas dari jasad renik patogen yang dapat membahayakan ternak dan manusia.
- c. **Sumber air.** Tersedia sumber air sepanjang tahun untuk dimanfaatkan dalam pemeliharaan ternak dan bagi usaha pendukung lainnya.
- d. **Kandang dan perlengkapannya.** Pada sistem pemeliharaan intensif, kandang yang dimanfaatkan dapat berupa kandang kelompok atau kandang individu. Kandang yang digunakan mempunyai persyaratan minimal: (i) cukup sirkulasi udara dan terang, (ii) mempunyai tempat penampungan kotoran dan sisa pakan, dan kandang mudah dibersihkan, serta (iii) luas kandang memenuhi persyaratan daya tampung ternak. Pada sistem pemeliharaan semi intensif, padang pangunan (*paddock*) disesuaikan dengan kapasitas tampung dan dilengkapi dengan tempat penanganan ternak, yang berupa kandang jepit.
- e. **Bibit betina dan/atau jantan.** Untuk lebih menjamin mutu produk yang sesuai, diperlukan bibit ternak yang layak untuk proses produksi. Dengan persyaratan sebagai berikut :
 - 1. Persyaratan umum:
 - a. Sehat dan bebas dari segala cacat fisik dan genetik;
 - b. Bibit betina harus bebas dari cacat saluran reproduksi, tidak menunjukkan gejala kemandulan dan ambing normal, serta mempunyai sifat keindukan yang baik; serta
 - c. Bibit jantan mempunyai libido dan kualitas sperma yang baik, serta bebas dari cacat pada saluran kelamin.

2. Persyaratan khusus:
 - a. Warna tubuh dominan tidak menyimpang (sesuai) dengan warna umum rumpun/galur ternak;
 - b. Bentuk dan ukuran antara bagian kepala, leher dan tubuh ternak harus serasi;
 - c. Masih dalam usia produktif (2,5 – 8 tahun); dan
 - d. Bibit jantan mempunyai struktur pertulangan yang kuat dan pertumbuhan otot yang baik.
- f. **Pakan.** Tersedia pakan sesuai status fisiologik (dewasa jantan, dewasa kering, dewasa bunting, dewasa laktasi, pedet lepas sapih, pedet prasapih), baik yang berasal dari tanaman pakan rerumputan, leguminosa, dedaunan, dan sumber lainnya (hasil samping tanaman pertanian), maupun konsentrat, dan pakan aditif. Air minum harus tersedia secara tidak terbatas.
- g. **Obat hewan.** Obat hewan dapat berupa sediaan biologik, farmaseutik, premix dan obat alami. Penyediaan obat disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat kesehatan ternak.
- h. **Tenaga kerja.** Tenaga kerja seyogyanya merupakan anggota keluarga kelompok peternak, yang pemanfaatannya disesuaikan dengan kebutuhan terkait sistem pemeliharaan (ekstensif, intensif atau semi intensif) dan skala usaha serta mempertimbangkan efisiensi curahan tenaga kerja.

2.1.2. Proses produksi

Dalam usaha pembibitan, faktor-faktor yang perlu diperhatikan antara lain: (a) manajemen perkawinan dan perawatan kebuntingan, (b) manajemen kelahiran dan laktasi, (c) manajemen pembesaran pedet, (d) pencatatan informasi terkait proses produksi, (e) seleksi dan penggantian bibit, serta (f) manajemen kesehatan hewan.

- a. ***Manajemen perkawinan dan perawatan kebuntingan.*** Untuk memperoleh keturunan yang baik dimulai dengan mengawinkan induk dengan pejantan yang berkualitas baik. Pola perkawinan dapat dilakukan secara alami (kawin alam) atau dengan inseminasi buatan (IB). Pada kawin alam, rasio jantan : betina 1 : 8-10. Pada kawin IB sebaiknya menggunakan *semen* yang berkualitas baik. Induk apabila dikawinkan lebih dari tiga kali, perkawinan "tepat waktu" dan kualitas pejantan/*semen* cukup baik, ternyata tidak bunting, agar segera diganti karena ada kecenderungan induk majir. Program penyerentakan berahi dapat dilaksanakan untuk meningkatkan efisiensi reproduksi. Namun, keputusan pemanfaatannya disesuaikan dengan kebutuhan. Induk yang telah terdeteksi bunting harus dirawat dengan baik.
- b. ***Manajemen kelahiran dan laktasi.*** Lama kebuntingan pada sapi sekitar sembilan bulan dan pada kerbau sekitar 10 bulan. Induk yang menunjukkan tanda-tanda akan beranak perlu dipisahkan dengan ternak lainnya. Pengawasan cukup dari jauh, pertolongan kelahiran tidak diperlukan pada kelahiran normal, hanya diperlukan pada kelahiran abnormal. Anak diusahakan untuk dapat menyusu pada induknya. Pemberian pakan disesuaikan kebutuhan untuk produksi susu dan perbaikan kondisi tubuh.
- c. ***Manajemen pembesaran pedet.*** Pedet setelah sapih (6-7 bulan) sampai siap kawin (umur \pm 18 bulan) memerlukan manajemen pakan yang baik karena merupakan fase pertumbuhan. Imbalan protein dan sumber serat perlu diperhatikan untuk mencapai dewasa kelamin dan dewasa tubuh yang ideal sesuai rumpun ternak.
- d. ***Pencatatan informasi terkait proses produksi.*** Pencatatan (*recording*) meliputi: (i) identitas ternak (rumpun, silsilah, umur,

jenis kelamin), serta (ii) waktu dan informasi dalam proses produksi (tanggal kawin, tanggal lahir, nomor atau identitas induk dan pejantan, jenis kelamin, bobot lahir, bobot sapih, tanggal sapih, tanggal dan jenis vaksinasi, kondisi pedet baru lahir (normal, cacat bawaan, kesulitan lahir), serta tanggal mutasi ternak untuk dijual, mati, atau dipotong).

- e. **Seleksi dan penggantian induk.** Seleksi dilakukan berdasarkan performan individu (induk, pejantan, pedet) yang meliputi kinerja produksi dan atau reproduksi, rata-rata bobot sapih (umur 205 hari), konformasi tubuh (kualitatif dan kuantitatif). Induk sebaiknya diganti setelah berumur lebih dari 8 tahun atau lebih muda kalau tidak memenuhi syarat sebagai induk dan sudah tidak produktif lagi. Pejantan yang digunakan dalam suatu kelompok peternak tidak boleh lebih dari 3 tahun untuk menghindari terjadinya *inbreeding*.
- f. **Manajemen kesehatan hewan.** Status kesehatan hewan merupakan salah satu prasyarat yang perlu dipenuhi dalam usaha pembibitan sapi potong meliputi:
 - i. Sapi induk harus dinyatakan sehat baik secara klinis maupun serologis (laboratorium);
 - ii. Tidak ditemui kelainan fisik seperti luka, Bengkak dan peradangan kulit, eksudat, diare, gangguan alat gerak, perubahan warna pada selaput membranosa dan kelainan pada saluran reproduksi;
 - iii. Monitoring dan pencatatan status kesehatan hewan secara periodik; serta
 - iv. Bebas dari penyakit menular alat reproduksi seperti *infectious bovine rhinotracheitis* (IBR), *bovine viral diarrhoea* (BVD), *ephemeral bovine leucosis* (EBL), *brucellosis*, *leptospirosis* dan *trichomoniasis*.

- v. Apabila terjadi gangguan kesehatan hewan, segera melapor kepada dokter hewan dan atau petugas para medis kehewanan setempat.

2.2. Usaha Penggemukan Sapi Potong

Efisiensi produksi usaha penggemukan antara lain dipengaruhi oleh pemilihan sapi bakalan yang tepat, perkandangan, manajemen pakan dan kesehatan hewan, manajemen produksi serta aspek pascapanen dan pemasaran.

2.2.1. Seleksi sapi bakalan

Kriteria yang dipergunakan dalam seleksi sapi bakalan untuk usaha penggemukan sapi adalah :

- a. Bobot badan minimal 40% dari bobot sapi dewasa, atau minimal 225 kg untuk sapi lokal;
- b. Kondisi badan dalam keadaan kurus (skor kondisi tubuh ≤ 2) dan sehat; serta
- c. Ukuran tubuh dengan frame (kerangka) yang besar.

2.2.2. Perkandangan

- a. Luas kandang kelompok untuk sapi dengan berat badan 200 – 250 kg adalah $\pm 3 \text{ m}^2$ per ekor, sedangkan pada kandang individual adalah $2,5 \times 1,2 \text{ m}^2$.
- b. Persyaratan kandang lainnya mengikuti kandang sapi pada usaha pembibitan.

2.2.3. Manajemen Pakan

Pakan ternak berupa hijauan diberikan sekitar 10% (bahan segar) dari bobot badan dan pakan konsentrat diberikan untuk mencapai konsumsi 3,5-4% (bahan kering) dari bobot badan sapi. Kualitas pakan mengandung minimal 68% jumlah energi dicerna (*total digestible energy*) dengan kandungan protein 12%. Target pertambahan bobot badan harian minimal 0,6 kg dan bobot potong mencapai minimal 400 kg. Air minum diberikan secara *ad libitum*.

2.2.4. Manajemen kesehatan hewan

Persyaratan kesehatan hewan perlu dipenuhi dalam kegiatan usaha penggemukan sapi potong. Kesehatan hewan tersebut berkaitan dengan penyakit hewan menular, penyakit non-infeksius dan gangguan metabolisme yang dapat mempengaruhi produktivitas ternak. Pada dasarnya persyaratan dan penanganan gangguan kesehatan hewan ini sama dengan usaha pembibitan, namun harus aman dan sehat apabila dilakukan pemotongan untuk tujuan konsumsi.

2.2.5. Manajemen produksi

Dalam usaha penggemukan, peternak dapat memelihara sapi lebih dari 2 ekor dan sangat tergantung pada kesiapan tenaga kerja, waktu dan dana operasional. Semakin banyak ternak sapi yang dipelihara untuk penggemukan, maka semakin tinggi keuntungan yang diperoleh peternak pada saat panen (dalam siklus 5-6 bulan).

2.2.6. Pascapanen dan pemasaran

Pemeliharaan sapi potong dan kerbau disamping menghasilkan daging sebagai produk utama, juga menghasilkan pupuk kandang sebagai bahan baku pupuk organik dan biogas yang mempunyai nilai ekonomis. Kotoran sapi dan kerbau dapat menjadi sumber hara yang dapat memperbaiki struktur tanah sehingga menjadi lebih subur. Biogas dapat dimanfaatkan sebagai sumber alternatif energi rumah tangga peternak.

Sapi dan kerbau hasil penggemukan dijual berdasarkan per kg berat badan hidup dan taksiran daging. Pemasaran sapi siap potong dilakukan oleh kelompok peternak di LL sehingga memiliki posisi tawar yang tinggi.

III. SEKOLAH LAPANG PEMBIBITAN DAN PENGGEMUKAN SAPI POTONG

Sekolah Lapang Pembibitan dan Penggemukan Sapi Potong (SL-PPSP) merupakan kegiatan lanjutan hasil proses pembelajaran untuk memperluas tingkat adopsi teknologi yang telah berhasil dilakukan para peternak di LL.

3.1. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan untuk mensukseskan kegiatan SL PPSP adalah melalui kegiatan partisipatif yang didasarkan pada sumberdaya spesifik lokasi dan dilakukan secara terpadu, bersinergi dan dinamis dengan pemberian insentif terbatas. Pendekatan SL berfungsi sebagai pusat belajar pengambilan keputusan para peternak, sekaligus merupakan forum tukar menukar informasi dan pengalaman lapang serta pembinaan manajemen kelompok.

Guna meningkatkan motivasi peternak dalam kelompok SL perlu adanya sosialisasi dan penyuluhan yang mampu meningkatkan efisiensi usaha sapi potong. Hal ini dapat dilakukan melalui sarasehan/lokakarya, pelatihan, distribusi brosur/leaflet, audio visual, dan lain sebagainya. Melalui SL peternak akan mampu mengambil keputusan untuk menerapkan teknologi yang sesuai dengan kondisi sumberdaya setempat secara sinergis dan berkelanjutan.

3.2. Pemandu dan Peserta

Pemandu lapang di SL pada prinsipnya adalah sama dengan pemandu lapang di LL. Pesertanya adalah perwakilan dari kelompok-kelompok anggota VBC maupun kelompok peternak sapi lainnya.

3.3. Waktu

SL dapat dilaksanakan setelah kegiatan LL berlangsung maupun secara bertahap, sejalan dengan waktu pelaksanaan penerapan teknologi. Waktu pelaksanaan disesuaikan dengan jenis inovasi teknologi yang diintroduksikan berdasarkan potensi sumberdaya setempat. Hal ini dapat dilakukan setelah diperoleh hasil dari teknologi yang diintroduksikan di LL maupun masih dalam proses pelaksanaan teknologi dimaksud.

IV. IMPLEMENTASI PENDAMPINGAN DAN DUKUNGAN UK/UPT LINGKUP BADAN LITBANG PERTANIAN

Pendampingan merupakan suatu kegiatan pembinaan intensif dan terus-menerus yang diberikan kepada kelompok peternak dalam melaksanakan kegiatan LL dan SL-PPSP.

4.1. Model Pendampingan Melalui LL dan SL-PPSP

Pemilihan lokasi LL-PPSP diprioritaskan pada kawasan sentra produksi pembibitan atau penggemukan yang telah ditentukan. Lokasi penerapan LL-PPSP pada kelompok peternak terpilih ditentukan bersama dengan semua pihak (BPTP, Dinas teknis, kelompok peternak dan LSM). Penerapan LL dilakukan pada kelompok peternak dengan mengikuti sertakan seluruh anggotanya (sekitar 20-25 KK). Kegiatan pendampingan LL dan SL-PPSP akan menghasilkan kinerja peningkatan produktivitas dan kualitas sapi potong dalam suatu kawasan secara langsung, karena pendampingan didasarkan kepada pemahaman permasalahan yang terjadi di kawasan setempat.

Pendampingan LL dan SL-PPSP harus mengacu pada aspek pembibitan atau penggemukan dari unggulan daerah yang bersangkutan. Hal ini ditentukan berdasarkan besarnya pangsa pasar, keuntungan kompetitif, nilai ekonomi, sebaran wilayah produksi, dan kesesuaian agroekologi. Aspek pembibitan dan penggemukan menjadi prioritas yang akan dikawal.

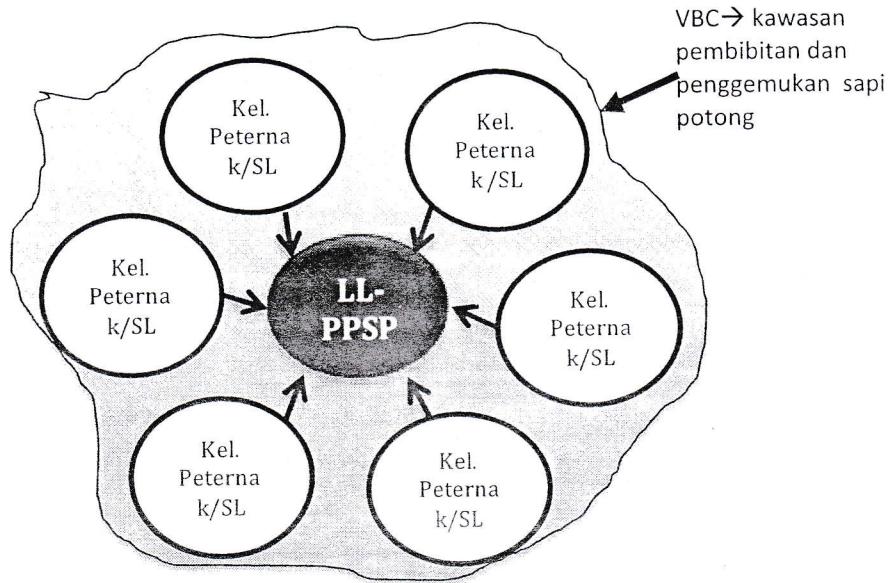
Model pendampingan teknologi dan kelembagaan dalam LL dan SL-PPSP mensinergikan dan mengintegrasikan berbagai kegiatan UK/UPT yang mempunyai tugas dan fungsi penyediaan inovasi pertanian, yaitu Puslitbang Peternakan, Balitnak dan Lolit Sapi

Potong, BB Mektan, PSEKP dan BBP2TP dalam mendukung pendampingan langsung oleh BPTP di daerah.

LL sebagai unit percontohan dikembangkan dari salah satu kelompok peternak baik yang ada di wilayah VBC maupun di luar wilayah VBC. Keberhasilan pengembangan teknologi yang dikembangkan di LL, disebarluaskan ke kelompok-kelompok peternak sapi potong lainnya. Penyebarluasan teknologi dari LL ke luar wilayah LL dilakukan melalui SL-PPSP.

Pendampingan melalui LL dan pengembangannya melalui SL merupakan upaya pemberdayaan kelompok peternak. Pada SL diterapkan pendekatan sebagai berikut: (a) SL merupakan proses pembelajaran yang membuka kesempatan peternak untuk melakukan pilihan; (b) Adanya kegiatan bersama di kandang peternak secara reguler dengan jumlah kelompok peternak yang terbatas; (c) Kelompok peternak dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan selama satu satuan waktu tertentu; (d) Adanya kurikulum yang berbasis pada kondisi spesifik lokasi; dan (5) Adanya pendampingan yang intensif.

SL-PPSP merupakan suatu wilayah pengembangan ternak baik yang tercakup dalam VBC maupun di luar VBC yang dikelola oleh beberapa kelompok peternak. Peternak sapi potong yang menjadi anggota kelompok peternak itu belajar di LL-PPSP sebagai unit percontohan (Gambar 1).



Gambar 1. Konsep SL-PPSP

4.2. Tahapan Pendampingan LL dan SL-PPSP

Tahapan pendampingan dalam pengembangan kawasan pembibitan dan penggemukan sapi potong harus dilakukan melalui pendekatan wilayah secara biofisik, sosial-ekonomi, budaya dan kelembagaan.

4.2.1. Identifikasi kondisi biofisik

Identifikasi kondisi biofisik difokuskan pada sentra produksi *existing*. Karakterisasi yang diamati meliputi ketinggian tempat, curah hujan, suhu, kelembaban udara, tanah (jenis, fisik, kimiawi, kelembaban), dan topografi. Hasil karakterisasi biofisik wilayah berguna untuk memperoleh gambaran tentang permasalahan dan potensi wilayah sebagai dasar pengembangan LL dan SL-PPSP sebagai wahana introduksi inovasi teknologi yang relevan untuk mengatasi permasalahan biofisik wilayah setempat.

4.2.2. Identifikasi kondisi sosial ekonomi

Identifikasi kondisi sosial ekonomi difokuskan pada keragaan sosial dan ekonomi masyarakat/kelompok peternak di sentra produksi. Aspek yang diamati meliputi jumlah rumah tangga peternak, jumlah anggota keluarga, sebaran usia penduduk, sebaran jenis kelamin penduduk, tingkat pendidikan, jumlah sapi, status pemilikan, tingkat pendapatan, jenis pekerjaan dan kegiatan usaha. Keragaan sosial ekonomi dapat dimanfaatkan sebagai landasan dalam penentuan metode pendampingan yang efektif dan efisien.

4.2.3. Identifikasi kondisi sosial budaya

Identifikasi kondisi sosial budaya difokuskan pada keragaan budaya/adat istiadat dari masyarakat/kelompok peternak di sentra produksi. Aspek yang perlu diamati meliputi suku bangsa, agama, kebiasaan/adat-istiadat, tata cara dan pranata sosial. Keragaan budaya masyarakat dapat dimanfaatkan untuk menentukan pemilihan metode pendampingan yang efektif dan efisien.

4.2.4. Identifikasi kondisi kelembagaan

Seperti halnya pada aspek biofisik, sosial ekonomi, dan budaya, identifikasi kondisi kelembagaan juga difokuskan pada kawasan sentra produksi. Aspek yang perlu diamati meliputi kelembagaan peternak dan kelembagaan pendukung seperti koperasi, permodalan, serta penyuluhan.

4.3. Pendampingan Oleh Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP)

4.3.1. Unit percontohan

BPTP mengembangkan unit percontohan pengembangan teknologi yang mendukung pembibitan dan penggemukan sapi potong. Skala percontohan adalah satu kelompok peternak sapi potong yang beranggotakan 20-25 KK dengan jumlah sapi minimal 50 ekor sapi potong. Unit percontohan ini selain dimaksudkan memberikan pembelajaran bagi peternak lain peserta SL-PPSP, juga menjadi wahana pengkajian bagi peneliti/penyuluhan BPTP. Dengan demikian peneliti/penyuluhan BPTP dapat memanfaatkan data perkembangan yang terjadi dalam unit percontohan sebagai bahan penyusunan karya ilmiah, untuk memelihara profesionalisme peneliti/penyuluhan.

4.3.2. Penyediaan materi penyuluhan

Keberhasilan teknologi pada LL dituliskan dalam media informasi tercetak atau audio visual sebagai *success story* untuk dijadikan bahan penyuluhan bagi para penyuluhan pertanian di lapang. Media tercetak dapat disiapkan dalam bentuk leaflet, folder, brosur atau petunjuk teknis teknologi yang muatannya terdiri dari unsur-

unsur teknologi yang dikembangkan untuk aspek pembibitan dan penggemukan sapi potong. Media informasi tersebut disebarluaskan kepada khalayak peternak dalam jumlah eksemplar yang cukup.

4.3.3. Pengawalan teknologi dan dinamika kelembagaan

Pengawalan teknologi dan dinamika kelembagaan dilakukan secara partisipatif melibatkan peternak sapi potong binaan. Upaya yang dilakukan adalah:

- a. Memahami dan menguasai inovasi teknologi usaha pembibitan dan penggemukan sapi potong;
- b. Berusaha menumbuh-kembangkan unit LL dan SL-PPSP di suatu kawasan;
- c. Membantu kelompok peternak dalam: (i) penyusunan Rencana Usaha Kelompok/Rencana Anggaran Belanja, (ii) penyiapan rencana usaha budidaya sapi dan pengelolaan rantai pasok, serta (iii) pembangunan kelembagaan kelompok peternak;
- d. Fasilitasi kemitraan usaha dengan pelaku usaha sapi potong; dan
- e. Memfasilitasi konsultasi dan komunikasi yang baik dengan dinas serta instansi terkait untuk mendorong percepatan pengembangan LL dan SL-PPSP.

4.3.4. Menjadi narasumber

Dalam upaya mendukung tercapainya sasaran pendampingan yang efektif dan efisien, peneliti/penyuluh BPTP berperan menjadi narasumber dalam setiap pelatihan yang diselenggarakan Pusat Pelatihan (Badan SDM Pertanian). Materi yang disampaikan dalam pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan peternak sapi potong.

4.4. Pendampingan oleh Puslitbang/Balai Besar/Balit/Lolit

4.4.1. Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan

Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan (Puslitbangnak) berperan menyediakan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dan Pedoman Umum (Pedum) usaha pembibitan dan penggemukan sapi potong, promosi dan sosialisasi. Juklak dan Pedum LL dan SL-PPSP disusun untuk memberikan masukan konsep kepada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjenakeswan) dalam terwujudnya PSDSK 2014.

Juklak atau Pedum LL dan SL-PPSP mengakomodasikan 5 program pokok yang tertuang dalam *blue print* PSDSK 2014. Untuk menjalankan fungsi dukungan promosi, Puslitbangnak melakukan advokasi dan promosi kepada pelaku usaha sapi potong, pemerintah daerah, dan *stakeholders* terkait lainnya. Puslitbangnak juga berperan dalam melakukan sosialisasi konsep model pembibitan dan penggemukan sapi potong melalui LL dan SL-PPSP kepada BPTP untuk dilanjutkan kepada seluruh *stakeholders*.

4.4.2. Balai Penelitian Ternak/Loka Penelitian Sapi Potong

Balai Penelitian Ternak (Balitnak) dan Loka Penelitian Sapi Potong (Lolit Sapi Potong) memberikan dukungan dalam apresiasi/pelatihan (*Training of Master of Trainer/ToMT*), penyiapan dan penyediaan bibit sapi potong (pejantan), serta merekomendasikan bibit sapi potong yang baik. Apresiasi/Pelatihan TOMT dilaksanakan untuk peningkatan kapasitas tenaga pendamping BPTP dan Pemandu Lapang dalam melakukan pendampingan LL dan SL-PPSP. Puslitbang/Balai Besar/Balit dan Lolit menyiapkan modul-modul apresiasi TOMT dan BPTP dapat menyiapkan modul-modul apresiasi TOT.

Untuk mendukung BPTP melakukan demplot di LL-PPSP, Balit dan Lolit dapat menyediakan bibit, dimana penyiapan bibit ini harus sudah dilaksanakan pada tahun sebelum pendampingan LL-PPSP.

4.4.3. Balai Besar Penelitian Veteriner

Balai Besar Penelitian Veteriner (Bbalitvet) dapat memberikan dukungan kepada BPTP berupa penyediaan vaksin untuk sapi potong, rekomendasikan teknologi pencegahan dan pengendalian penyakit hewan, menyusun buku petunjuk teknis kesehatan sapi potong, dan melakukan pelatihan serta sebagai narasumber.

4.4.4. Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Mekanisasi Pertanian

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Mekanisasi Pertanian (BB Mektan) memberikan dukungan dalam bentuk penyediaan prototipe alat dan mesin (alsin) serta apresiasi/pelatihan. Pembentukan dan pembinaan kelembagaan Unit Pengelola Jasa Alsintan (UPJA) juga didukung oleh BB Mektan.

4.4.5. Pusat Studi Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian

Pusat Studi Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSE-KP) memberikan dukungan dalam bentuk Pedum Kelembagaan Asosiasi Pemasaran Sapi Potong. Pedum ini diperlukan untuk mendukung pemasaran sapi potong yang dapat memfasilitasi peternak dalam meningkatkan pemasaran dan memperoleh posisi tawar yang tinggi.

4.4.6. Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian

Sebagai lembaga yang mengkoordinasikan BPTP, Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BBP2TP) mendukung dalam melakukan koordinasi peran dan tugas BPTP dalam mewujudkan program PSDSK 2014. BBP2TP juga melakukan koordinasi dengan Puslitbang/Balai Besar dan instansi lain terkait dengan tugas-tugas BPTP. BBP2TP juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan pendampingan BPTP sekaligus memberikan arahan untuk perbaikan kinerja pendampingannya.

4.5. Pengorganisasian

Pelaksanaan LL dan SL-PPSP yang terpadu dan terorganisasi dengan baik mulai dari tingkat kelompok peternak, kabupaten/kota, provinsi sampai tingkat pusat, memerlukan tim pelaksana pendampingan operasional di masing-masing tingkatan.

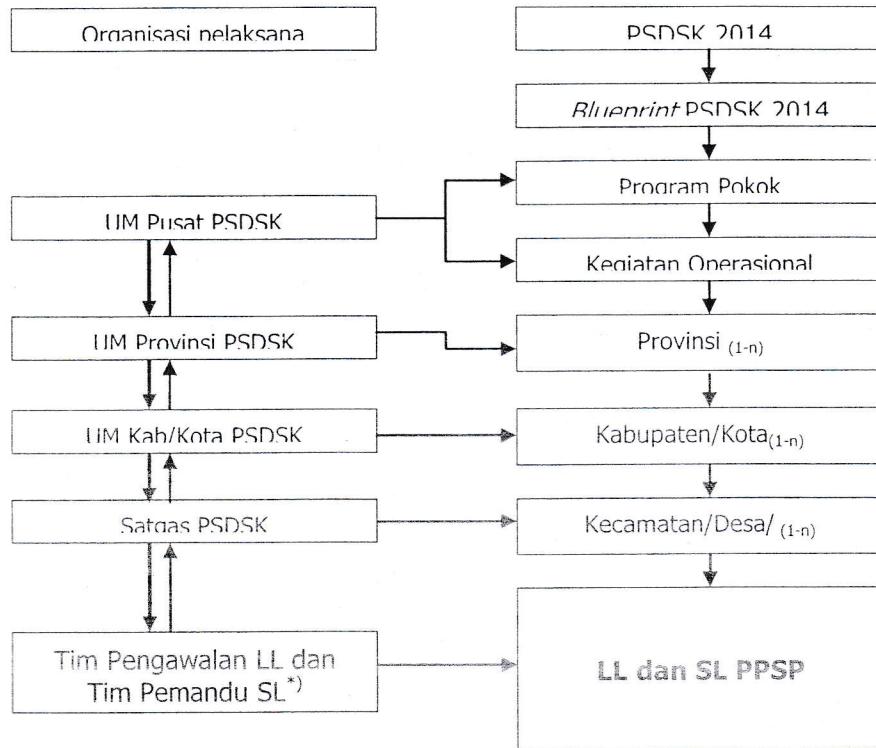
Di tingkat pusat yang bertanggungjawab menjadi pendamping adalah Unit Manajemen (UM) PSDSK dan beranggotakan pejabat di jajaran Ditjenakeswan dan Badan Litbang Pertanian, serta ditetapkan melalui SK Dirjenakeswan.

Tim pendamping tingkat provinsi ditetapkan melalui SK Gubernur/Kepala Dinas Peternakan/Pertanian Provinsi terdiri dari UM PSDSK tingkat provinsi, dengan anggota dari BPTP, Bakorluh dan Dinas Provinsi yang terkait dengan pertanian.

Di tingkat kabupaten/kota, pendampingan LL dan SL-PPSP dilakukan oleh satuan tugas (Satgas) PSDSK, anggota dinas yang menjalankan fungsi peternakan, Bapelluh, yang ditetapkan melalui SK Bupati/Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

Pendampingan di tingkat kecamatan dilakukan Satgas PSDSK tingkat kecamatan yang anggotanya terdiri dari KCD/Mantri Tani,

UPTD/BPP dan Kesehatan Hewan. Operasionalisasi pendampingan dikoordinasikan pada setiap POSKO mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota (Gambar 2).



Keterangan :

UM : Unit Manajemen, yang hierarkinya terdiri dari tingkat pusat sampai kecamatan (Satgas). UM merupakan unit fungsional yang menangani program PSDSK. Keanggotaan UM/Satgas meliputi lembaga/dinas teknis yang terkait dengan peternakan, lembaga litbang, Bappeda, dan *stakeholders* terkait.

LL : Laboratorium Lapang,

SL : Sekolah Lapang

*) : Kegiatan LL dan SL dikawal dan dipandu oleh Tim yang terkait dalam struktur UM.

Gambar 2. Organisasi Pelaksana LL dan SL-PPSP

4.5.1. Tugas Tim Pendamping Tingkat Pusat (Unit Manajemen PSDSK Pusat)

Tim pendamping pusat atau Unit Manajemen Pusat (UMP) mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Penyusunan pedoman pelaksanaan;
- b. Fasilitasi dan sosialisasi LL dan SL-PPSP;
- c. Pengawasan penyaluran bantuan teknis operasional;
- d. Pembinaan teknis dan administrasi;
- e. Koordinasi dengan instansi terkait; dan
- f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan LL dan SL-PPSP serta membantu pemecahan masalah-masalah operasional.

4.5.2. Tugas Tim Pendamping Tingkat Provinsi (Unit Manajemen Provinsi)

Tim pendamping tingkat provinsi atau Unit Manajemen Provinsi mengemban tugas sebagai berikut:

- a. Menetapkan lokasi kegiatan LL dan SL-PPSP;
- b. Menyusun petunjuk teknis;
- c. Melaksanakan sosialisasi, koordinasi, advokasi dan verifikasi kabupaten/kota pelaksana kegiatan LL dan SL-PPSP;
- d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dan pengawasan penyaluran bantuan dalam rangka pelaksanaan kegiatan LL dan SL-PPSP;
- e. Melakukan pemantauan dan pengendalian dan membantu pemecahan masalah yang dihadapi di lapangan; dan

- f. Menyusun laporan pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian serta menyampaikannya ke Ditjenakeswan.

4.5.3. Tim Pendamping Tingkat Kabupaten/Kota (Unit Manajemen Tingkat Kabupaten/Kota (UMK)

Tim pendamping tingkat Kabupaten/Kota tugasnya antara lain adalah:

- a. Sosialisasi program dan kegiatan operasional kepada pemandu lapangan dan kelompok peternak;
- b. Mensosialisasikan petunjuk teknis;
- c. Melakukan seleksi dan verifikasi terhadap kelompok peternak dalam penyusunan Rencana Usaha Kelompok;
- d. Melakukan pendampingan intensif dan pembinaan terkait tugas dan fungsi institusinya dalam upaya keberhasilan pelaksanaan kegiatan pada kelompok peternak;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi di lapang; dan
- f. Menyusun laporan pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian serta menyampaikan laporan kepada Dinas Provinsi.

4.5.4. Tim Pendamping Tingkat Kecamatan (Satgas Teknis)

Satgas sebagai ujung tombak pelaksanaan PSDSK 2014 mempunyai tugas untuk melaksanakan pendampingan teknis, pemberdayaan kelompok, pemantauan dan pelaksanaan pelaporan.

V. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

5.1. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring perkembangan kegiatan pendampingan LL dan SL-PPSP dilakukan oleh Tim Monev BPTP terhadap setiap kegiatan pendampingan di wilayah Kabupaten/Kota melalui: (a) Laporan kemajuan kegiatan bulanan yang mencakup perkembangan pelaksanaan kegiatan dan hasil-hasil yang telah dicapai, dan laporan ini dibuat oleh setiap *Liaison Officer* (LO) atau Koordinator Wilayah (Korwil), dan (b) Kunjungan lapang ke lokasi LL dan SL-PPSP sesuai keperluan.

Tim Monev BBP2TP melakukan pemantauan terhadap kegiatan pendampingan pengembangan LL dan SL-PPSP di setiap BPTP melalui: (a) Laporan kemajuan kegiatan pendampingan yang dibuat oleh Tim Monev BPTP setiap 3 (tiga) bulan, yang mencakup perkembangan pelaksanaan kegiatan dan kemajuan atau hasil-hasil yang telah dicapai, dan (b) Kunjungan lapang ke lokasi LL dan SL-PPSP dilakukan 1-2 kali setahun atau sesuai keperluan.

Evaluasi akhir tahun kegiatan pendampingan pengembangan LL dan SL-PPSP dilakukan oleh Tim Monev BPTP terhadap setiap kegiatan pendampingan melalui: (a) Laporan akhir yang dibuat oleh setiap LO, dan (b) Penyelenggaran kegiatan lokakarya/workshop di masing-masing BPTP.

Evaluasi akhir tahun kegiatan pendampingan LL dan SL-PPSP oleh BPTP secara nasional dilakukan oleh Tim Monev BBP2TP melalui: (a) Analisis laporan akhir tahun BPTP, dan (b) lokakarya/workshop tingkat nasional.

Pelaporan pelaksanaan pendampingan LL dan SL-PPSP dibuat oleh petugas pendamping (pengkaji BPTP), berupa laporan kegiatan bulanan, laporan tengah tahun dan laporan akhir tahun. Laporan

memuat data dan informasi tentang semua kegiatan yang dilaksanakan, hasil yang dicapai, permasalahan yang dihadapi dan jalan keluar yang dilakukan.

5.2. Pelaporan

Pelaporan pelaksanaan pendampingan dilakukan secara berjenjang oleh masing-masing petugas pendamping di tiap tingkatan, melalui pengumpulan data di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten, ditembuskan kepada Unit Manajemen PSDSK di Tingkat Provinsi. BBP2TP merangkum laporan pelaksanaan pengawalan dan pendampingan untuk dilaporkan kepada Badan Litbang Pertanian, ditembuskan kepada Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan.

VI. PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Laboratorium Lapang dan Sekolah Lapang Dalam Pembibitan dan Penggemukan Sapi Potong (LL dan SL-PPSP) memuat hal-hal yang bersifat umum, sehingga perlu dijabarkan dalam bentuk yang lebih teknis dan operasional disesuaikan dengan kondisi usaha sapi potong dan budaya masyarakat setempat.



ISBN : 978-602-8475-34-1

Pusat Penelitian dan Pengembangan Peternakan
Jalan Raya Pajajaran Kav. E 59, Bogor 16151
Telp. (0251) 8322185, 8322138
Fax. (0251) 8328382, 8380588
E-mail: crianci@indb.net.id